BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan di BAPENDA Kota Padang telah mencerminkan tata kelola yang modern dan transparan melalui pemanfaatan sistem digital serta alur kerja yang sistematis. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti ketergantungan pada proses input manual, tingginya beban kerja bendahara penerima, serta risiko gangguan teknis pada sistem. Permasalahan juga muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan pencatatan data karena proses manual, serta keterlambatan pengiriman rekening koran dari pihak bank. Selain itu, faktor eksternal seperti pelimpahan transaksi, gangguan pada sistem pembayaran online, dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat turut menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah. Ketidaksesuaian data serta minimnya informasi transaksi semakin memperberat tugas bendahara penerima. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi sistem informasi yang lebih baik, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan kebijakan guna memastikan efisiensi kerja, akurasi pelaporan, serta mengurangi risiko terjadinya selisih data dan keterlambatan proses administrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis diatas, untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penerimaan pendapatan daerah, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi Solusi dari beberapa penghambat dalam proses

penerimaan diantaranya,, BAPENDA Kota Padang perlu percepatan digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada input manual yang rawan kesalahan. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak bank juga perlu ditingkatkan agar rekening koran dapat disampaikan tepat waktu dan memuat informasi yang lebih rinci, khususnya untuk transaksi non-teller seperti QRIS. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur teknologi dan pemeliharaan sistem pembayaran online harus menjadi prioritas agar proses verifikasi data dapat dilakukan secara real time. Terakhir, kesiapan menghadapi perubahan kebijakan perlu diperkuat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan tim teknis yang mampu merespons arahan pusat secara cepat dan efektif.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA